

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Syukur, Fatahillah, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia : Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberti, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dewi .D. S dan Fatahillah A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Indie Publishing, Depok.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Faal, M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Hadimulyono, 1997, *Mempertimbangkan ADR :Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Indrati, Maria Farida , 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2*, Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono ,Kartini, 1986, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Meliala , A. Syamsudin dan E.Sumaryono, 1985, *Kenakalan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyono, Y. Bambang, 1994, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muhammad , Rusli , 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits oh the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Panggabean, Mopang L., 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro , 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko , 1988, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta

Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Simanjuntak, B, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.

Simorangkir, JTC, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeaidy, Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Widodo, J. Pajar, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishiing, Bandar Lampung.

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

JURNAL

Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No. 1/2008.

PENULISAN HUKUM

Lugasa Bagas, 2010, *Perlindungan Khusus Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penulisan hukum, Universitas Gadjah Mada

Gea Johanes, 2011, *Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (Analisis terhadap : Kasus 10 anak Bandara dan Kasus Deli)*, Penulisan hukum, Universitas Indonesia

Marlina Nia, 2011, *Penerapan Wajib Latihan Kerja sebagai Subsider Pidana Denda terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Penulisan hukum, Universitas Gadjah Mada

Yogi Hidayat, Mohamad, 2012, *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penulisan hukum, Universitas Gadjah Mada

Phisa Purbayani, Fani 2012, *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Konsep Restorative Justice pada Perkara Pidana Anak di Kabupaten Purbalingga dan Kota Yogyakarta*, Penulisan hukum, Universitas Gadjah Mada

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5332).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Declaration on the Rights of the Child) melalui Resolusi Majelis Umum PBB 1386 (XIV) tertanggal 20 November 1959.

Convention on the Rights of the Child dalam Resolusi PBB 44/25 tanggal 5 Desember 1989.

Riyadh Guidelines ditetapkan melalui Resolusi Nomor 45/112 dalam Sidang Pleno PBB ke-68, tanggal 14 Desember 1990.

Havana Rules merupakan Resolusi PBB Nomor 45/113, hasil Sidang Pleno PBB ke-68 tanggal 14 Desember 1990, berisi Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Dicabut Kebebasannya.

United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985).

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor :166 A/Kma/Skb/XII/2009 Nomor : 148 A/A/Ja/12/2009 Nomor : B/45/XII/2009 Nomor : M.Hh-08 Hm.03.02 Tahun 2009 Nomor : 10/Prs-2/Kpts/2009 Nomor : 02/Men.Pp Dan Pa/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi

INTERNET

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Artikel dalam <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, hlm.2 , diakses tanggal 12 Desember 2014

Direktorat Jenderal Kemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/detail/monthly/upt/db5c7120-6bd1-1bd1-e21b-313134333039> diakses pada tanggal 6 Oktober 2014

Direktorat Jenderal Kemasyarakatan, Sistem Database Pemasyarakatan,
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/status/monthly/>, diakses
tanggal 10 Februari 2015

Kejaksaan Republik Indonesia,
http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1 diakses
tanggal 4 Februari 2015

Rocky Marbun, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,
<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/> diakses pada
tanggal 4 Oktober 2014

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) ,2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*,
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf
diakses pada tanggal 5 Oktober 2014